

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan bilateral di antara Amerika Serikat dengan Kuba bukanlah hubungan bilateral yang statis atau hanya berhenti pada satu titik hubungan bilateral tertentu. Hubungan bilateral di antara keduanya memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan sikap politik luar negeri dari Amerika Serikat maupun Kuba. Hal ini berlaku pula ketika Amerika Serikat dan Kuba kini akhirnya menjalani politik luar negeri normalisasi hubungan bilateral kedua negara. Barrier ekonomi dalam hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Kuba berupa embargo pada akhirnya tetap bertahan dan tidak dicabut secara total mengikuti perkembangan upaya normalisasi. Walaupun pencabutan embargo ekonomi tersebut menjanjikan keuntungan ekonomi yang cukup besar bagi Amerika Serikat, namun kepentingan akan hak asasi manusia dan perkembangan demokrasi di Kuba muncul sebagai kepentingan nasional yang paling diprioritaskan dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pasca upaya normalisasi. Kepentingan nasional inilah yang telah memotivasi setiap keputusan yang diambil Amerika Serikat terhadap Kuba, termasuk dalam memutuskan untuk tetap mempertahankan embargo ekonomi pasca upaya normalisasi hubungan kedua negara.

Dalam proses untuk mewujudkan kepentingan nasional akan hak asasi manusia dan perkembangan demokrasi di Kuba, Presiden Obama dan Komisi Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat terlibat dalam proses kompromi

kebijakan, karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan status embargo seperti apa yang seharusnya ditetapkan oleh Amerika Serikat pasca berjalannya upaya normalisasi. Selama proses kompromi kebijakan dalam politik birokratik Amerika Serikat tersebut, Komisi Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat ternyata memiliki posisi daya tawar yang lebih besar jika dibandingkan dengan daya tawar yang dimiliki oleh Presiden Obama, karena adanya Helms-Burton Act 1996 dan argumen-argumen kuat dari senator-senator profesional. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan milik Komisi Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan embargo ekonomi akhirnya diimplementasikan sebagai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pasca upaya normalisasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa Komisi Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat telah berhasil memenangkan proses kompromi kebijakan melawan Presiden Obama untuk tetap mempertahankan embargo ekonomi guna mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat atas perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi di Kuba.

Pembahasan tentang keputusan Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan embargo ekonominya terhadap Kuba ini dapat menambahkan kontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional. Melalui pembahasan dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa dalam sebuah hubungan internasional embargo ekonomi masih menjadi sarana yang digunakan sebagai sebuah kebijakan politik luar negeri berbentuk sanksi terhadap negara lain meskipun penggunaannya sudah cukup jarang ditemui dewasa ini. Dapat diketahui

pula bahwa dalam proses penetapan sanksi terhadap negara lain, badan eksekutif suatu negara seperti halnya presiden bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang, namun proses penetapan sanksi terhadap negara lain juga melibatkan peran dan tanggung jawab dari komponen pemerintahan lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan terkait kebijakan politik luar negeri sebuah negara, utamanya yang menyangkut tentang pemberian sanksi terhadap negara lain, merupakan hal yang harus dipertimbangkan secara matang dan objektif karena kebijakan tersebut akan mempengaruhi dinamika hubungan internasional yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat.

Untuk semakin bisa berkontribusi bagi pengembangan ilmu hubungan internasional, pembahasan dalam skripsi ini masih dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai kebijakan embargo ekonomi Amerika Serikat pasca upaya normalisasi hingga akhir tahun 2016 yang mana tahun 2016 tersebut menandai akhir masa jabatan Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat sebagai presiden Amerika Serikat. Mulai tahun 2017 Amerika Serikat memasuki era pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dari Partai Republik. Era pemerintahan presiden Amerika Serikat yang baru bisa jadi membawa dinamika kebijakan politik luar negeri yang berbeda dari periode sebelumnya. Sehingga akan menjadi menarik apabila muncul tulisan-tulisan lainnya yang membahas mengenai bagaimana kelanjutan upaya normalisasi hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Kuba serta kelanjutan kebijakan embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba pasca upaya normalisasi hubungan bilateral kedua negara di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.